



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran : Nota Kesepakatan
Nomor : 903/6641/2020
04/PK/DPRD-SU/2020
Tanggal : 7 September 2020



**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 903/6641/2020
04/PK/DPRD-SU/2020
Tanggal : 7 September 2020

**TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : BASKAMI GINTING
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : HARUN MUSTAFA NASUTION
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : YASYIR RIDHO LOEBIS
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : RAHMANSYAH SIBARANI
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : SALMAN ALFARISI
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 yang meliputi rencana pendapatan dan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Program dan Kegiatan, Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 serta termasuk di dalamnya pendanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang dalam Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

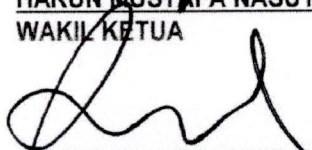
Medan, 7 September 2020

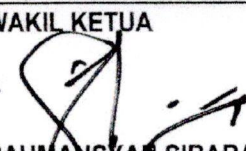

GUBERNUR SUMATERA UTARA
selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
selaku,
PIHAK KEDUA
BISHAM GINTING


HARUN MUSTAFA NASUTION
WAKIL KETUA


YASYIR RIDHO LOEBIS
WAKIL KETUA


RAHMANSYAH SIBARANI
WAKIL KETUA


SALMAN ALFARISI
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS-P.....	I - 2
1.3. Dasar Hukum	I - 3
BAB II : RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN DAERAH	II - 1
BAB III : PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TA. 2020	III - 1
BAB IV : PENUTUP	IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1.	: Perubahan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020	II-1
2.2.	: Perubahan Rincian Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020	II-2
2.3.	: Perubahan Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020	II-6
3.1.	: Perubahan Plafon Anggaran Belanja Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020	III-2
3.2.	: Perubahan Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020	III-5
3.3.	: Perubahan Plafon Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2020	III-8
3.4.	: Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Rincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020	III-11

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD Perubahan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan. PPAS-P antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2020. Selain hal tersebut, PPAS-P juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Perubahan Pagu sementara tersebut akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.PAPBD) Tahun Anggaran 2020.

PPAS Perubahan ini disampaikan secara bersamaan dengan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KU-PAPBD) Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disepakati sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020. Kedua dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (RKAP-PD).

PPAS Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2020 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran, oleh

karena itu PPAS-P disusun untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan yang tertuang dalam KU-P.APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah.

Dalam rancangan PPAS-P APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

I.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Tujuan Penyusunan PPAS-P Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampai;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

I.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;

14. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 20 Maret 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan Menteri Keuangan Nomor KMK 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
25. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/174/KPTS/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Sumatera Utara;

BAB II

**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Asumsi dasar kebijakan perubahan pendapatan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 secara umum mengalami perubahan pada komponen pendapatan serta pembiayaan daerah. Perubahan pendapatan diperkirakan berkurang sebesar Rp.813.480.963.318,00 dari target semula sebesar Rp.13.880.970.638.142,00 menjadi Rp. 13.067.489.674.824,00 atau berkurang sebesar 5,86 persen, dimana hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa komponen yang tidak sesuai dengan asumsi target sebelumnya. Adapun rincian perubahan pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/Berkurang
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1	PENDAPATAN DAERAH	13.880.970.638.142,00	13.067.489.674.824,00	(813.480.963.318,00)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.967.650.671.842,00	5.434.682.028.854,00	(532.968.642.988,00)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	5.412.948.217.898,00	4.926.456.652.305,00	(486.491.565.593,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	39.919.149.000,00	25.877.029.900,00	(14.042.119.100,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	314.468.580.289,00	248.362.356.856,00	(66.106.223.433,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	200.314.724.655,00	233.985.989.793,00	33.671.265.138,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	7.904.251.966.300,00	7.585.386.627.261,00	(318.865.339.039,00)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	426.080.937.300,00	571.463.712.261,00	145.382.774.961,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.731.961.034.000,00	2.483.124.579.000,00	(248.836.455.000,00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.746.209.995.000,00	4.530.798.336.000,00	(215.411.659.000,00)
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.068.000.000,00	47.421.018.709,00	38.353.018.709,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.068.000.000,00	47.421.018.709,00	38.353.018.709,00

Tabel 2.2
Perubahan Rincian Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4 (3-2)	5
PENDAPATAN	13.880.970.638.142,00	13.067.489.674.824,00	(813.480.963.318,00)	(5,86)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.967.650.671.842,00	5.434.682.028.854,00	(532.968.642.988,00)	(8,93)
Pendapatan Pajak Daerah	5.412.948.217.898,00	4.926.456.652.305,00	(486.491.565.593,00)	(8,99)
Pajak Kendaraan Bermotor	2.074.351.510.314,00	2.060.552.596.410,00	(13.798.913.904,00)	(0,67)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.541.009.779.616,00	983.131.112.260,00	(557.878.667.356,00)	(36,20)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	882.000.000.000,00	882.786.893.431,00	786.893.431,00	0,09
Pajak Air Permukaan	40.400.000.000,00	62.489.854.175,00	22.089.854.175,00	54,68
Pajak Rokok	875.186.927.968,00	937.496.196.029,00	62.309.268.061,00	7,12
Hasil Retribusi Daerah	39.919.149.000,00	25.877.029.900,00	(14.042.119.100,00)	(35,18)
Retribusi Jasa Umum	25.089.151.000,00	15.115.490.600,00	(9.973.660.400,00)	(39,75)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	24.359.151.000,00	14.615.490.600,00	(9.743.660.400,00)	(40,00)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	303.000.000,00	200.000.000,00	(103.000.000,00)	(33,99)
Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	92.000.000,00	-	(92.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Pengujian Mutu Barang	335.000.000,00	300.000.000,00	(35.000.000,00)	(10,45)
Retribusi Jasa Usaha	10.755.422.000,00	7.361.539.300,00	(3.393.882.700,00)	(31,56)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.780.144.000,00	3.102.382.500,00	(677.761.500,00)	(17,93)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	2.802.321.000,00	1.695.382.600,00	(1.106.938.400,00)	(39,50)
Retribusi Tempat Rekreasi	109.752.000,00	65.851.200,00	(43.900.800,00)	(40,00)
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.323.000.000,00	793.800.000,00	(529.200.000,00)	(40,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.740.205.000,00	1.704.123.000,00	(1.036.082.000,00)	(37,81)
Retribusi Perizinan Tertentu	4.074.576.000,00	3.400.000.000,00	(674.576.000,00)	(16,56)
Retribusi Pemberian Izin Trayek	300.000.000,00	250.000.000,00	(50.000.000,00)	(16,67)
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	150.000.000,00	10,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA	2.274.576.000,00	1.500.000.000,00	(774.576.000,00)	(34,05)

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4 (3-2)	5
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	314.468.580.289,00	248.362.356.856,00	(66.106.223.433,00)	(21,02)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	313.244.495.141,00	243.671.183.349,00	(69.573.311.792,00)	(22,21)
PT. Perkebunan Sumatera Utara	2.000.000.000,00	5.953.200.000,00	3.953.200.000,00	197,66
PT. Bank Sumut	283.280.080.000,00	188.037.661.330,00	(95.242.418.670,00)	(33,62)
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	200.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(50,00)
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	1.764.415.141,00	1.118.597.653,00	(645.817.488,00)	(36,60)
PDAM Tirtanadi	26.000.000.000,00	48.461.724.366,00	22.461.724.366,00	86,39
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	1.224.085.148,00	4.691.173.507,00	3.467.088.359,00	283,24
PT. Kawasan Industri Medan	1.085.890.947,00	4.623.456.681,00	3.537.565.734,00	325,78
PT. Asuransi Bangun Askrida	138.194.201,00	67.716.826,00	(70.477.375,00)	(51,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.314.724.655,00	233.985.989.793,00	33.671.265.138,00	16,81
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	600,00
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	50.000.000,00	350.000.000,00	300.000.000,00	600,00
Penerimaan Jasa Giro	43.818.888.000,00	43.818.888.000,00	-	-
Jasa Giro Kas Daerah	43.818.888.000,00	43.818.888.000,00	-	-
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)
Bidang Pekerjaan Umum	500.000.000,00	300.000.000,00	(200.000.000,00)	(40,00)
Pendapatan Denda Pajak	56.146.836.955,00	55.408.784.871,00	(738.052.084,00)	(1,31)
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	52.909.281.083,00	52.909.281.083,00	-	-
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.087.555.872,00	2.470.044.698,00	(617.511.174,00)	(20,00)
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	150.000.000,00	29.459.090,00	(120.540.910,00)	(80,36)
Pendapatan Dari Pengembalian	32.551.000.000,00	76.268.316.922,00	43.717.316.922,00	134,30
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	1.000.000,00	200.000.000,00	199.000.000,00	19.900,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	250.000.000,00	400.000.000,00	150.000.000,00	60,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	300.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	66,67
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	1.500.000.000,00	12.000.000.000,00	10.500.000.000,00	700,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Hibah	10.500.000.000,00	33.168.316.922,00	22.668.316.922,00	215,89
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana UP/GU/TU/LS	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	50,00

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4 (3-2)	5
Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	136.619.700,00	240.000.000,00	103.380.300,00	75,67
Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	100.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	36.619.700,00	40.000.000,00	3.380.300,00	9,23
Pendapatan BLUD	57.600.000.000,00	57.600.000.000,00	-	-
Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu	57.600.000.000,00	57.600.000.000,00	-	-
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	9.511.380.000,00	-	(9.511.380.000,00)	(100,00)
Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	9.511.380.000,00	-	(9.511.380.000,00)	(100,00)
DANA PERIMBANGAN	7.904.251.966.300,00	7.585.386.627.261,00	(318.865.339.039,00)	(4,03)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	426.080.937.300,00	571.463.712.261,00	145.382.774.961,00	34,12
Bagi Hasil Pajak	394.674.173.300,00	524.668.702.884,00	129.994.529.584,00	32,94
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	113.629.370.000,00	130.634.258.476,00	17.004.888.476,00	14,97
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21	276.063.480.000,00	389.085.172.511,00	113.021.692.511,00	40,94
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.981.323.300,00	4.949.271.897,00	(32.051.403,00)	(0,64)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	31.406.764.000,00	46.795.009.377,00	15.388.245.377,00	49,00
DBH SDA Minyak Bumi dan Gas	1.980.424.000,00	3.059.064.744,00	1.078.640.744,00	54,47
DBH SDA Mineral dan Batubara	15.304.621.000,00	26.584.415.178,00	11.279.794.178,00	73,70
DBH SDA Kehutanan	11.911.822.000,00	14.407.431.455,00	2.495.609.455,00	20,95
DBH SDA Panas Bumi	2.209.897.000,00	2.744.098.000,00	534.201.000,00	24,17
Dana Alokasi Umum	2.731.961.034.000,00	2.483.124.579.000,00	(248.836.455.000,00)	(9,11)
Dana Alokasi Umum	2.731.961.034.000,00	2.483.124.579.000,00	(248.836.455.000,00)	(9,11)
Dana Alokasi Umum	2.723.301.798.000,00	2.474.465.343.000,00	(248.836.455.000,00)	(9,14)
Dana Alokasi Umum Tambahan (Bantuan Pendanaan Gaji PPPK)	8.659.236.000,00	8.659.236.000,00	-	-
Dana Alokasi Khusus	4.746.209.995.000,00	4.530.798.336.000,00	(215.411.659.000,00)	(4,54)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	498.388.442.000,00	360.697.801.000,00	(137.690.641.000,00)	(27,63)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	498.388.442.000,00	360.697.801.000,00	(137.690.641.000,00)	(27,63)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.247.821.553.000,00	4.170.100.535.000,00	(77.721.018.000,00)	(1,83)

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang	%
1	2	3	4 (3-2)	5
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.068.000.000,00	47.421.018.709,00	38.353.018.709,00	422,95
Pendapatan Hibah	9.068.000.000,00	47.421.018.709,00	38.353.018.709,00	422,95
Pendapatan Hibah Pemerintah	-	38.853.018.709,00	38.853.018.709,00	#DIV/0!
Pemerintah Pusat	-	38.853.018.709,00	38.853.018.709,00	#DIV/0!
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	-	-
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	5.568.000.000,00	5.568.000.000,00	-	-
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	(500.000.000,00)	(14,29)
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	(500.000.000,00)	(14,29)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami perubahan, dimana sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 235.273.302.585,25 sedangkan pada APBD Tahun Anggaran 2020 SiLPA dicantumkan sebesar Rp.300.000.000.000,00 sehingga terjadi penurunan 21,58 Persen atau turun sebesar Rp. 64.726.697.414,75.

Terhadap pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.100.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut.

Rincian perubahan pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/Berkurang	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	300.000.000.000,00	235.273.302.585,25	(64.726.697.414,75)	(21,58)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	300.000.000.000,00	235.273.302.585,25	(64.726.697.414,75)	(21,58)
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pembentukan pinjaman daerah	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	200.000.000.000,00	135.273.302.585,25	(64.726.697.414,75)	(32,36)

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD). PPAS Perubahan disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah. Bidang urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dalam implementasi klasifikasi belanjanya dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Perangkat Daerah, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dalam implementasi klasifikasi belanjanya dilaksanakan oleh 14 (empat belas) Perangkat Daerah.

Disamping urusan wajib, terdapat juga bidang urusan pilihan Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang urusan pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara implementasinya dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah dan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Perangkat Daerah.

Secara garis besar prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 tidak mengalami perubahan, akan tetapi karena situasi pandemi COVID-19 maka seluruh target capaian kinerja harus disesuaikan dengan pagu anggaran yang masih tersedia. Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah).

Perubahan kebijakan belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terjadi pada komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung SKPD menjadi sebesar Rp.9.143.588.325.635,40 atau bertambah sebesar Rp.528.573.456.051,78 dari target semula yang direncanakan sebesar Rp.8.615.014.869.583,62. Pertambahan dimaksud diakibatkan adanya penambahan atas Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Pada komponen Belanja Langsung menjadi sebesar Rp.4.059.174.651.773,85 mengalami penurunan sebesar Rp.1.406.781.116.784,53 dari target semula sebesar Rp. 5.465.955.768.558,38, hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan pada program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020. Pengurangan dimaksud secara otomatis mengakibatkan penyesuaian capaian target tahun 2020 pada seluruh Perangkat Daerah.

Perubahan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Plafon Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.949.629.377.300,09	5.104.317.030.308,30	(845.312.346.991,79)
1.01	Pendidikan	3.641.079.765.895,00	3.495.074.932.098,10	(146.004.833.796,90)
1.01.01	Dinas Pendidikan	3.641.079.765.895,00	3.495.074.932.098,10	(146.004.833.796,90)
1.02	Kesehatan	603.100.252.569,00	506.836.850.639,00	(96.263.401.930,00)
1.02.01	Dinas Kesehatan	425.505.603.216,00	357.351.217.844,00	(68.154.385.372,00)
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	68.249.696.743,00	61.477.677.625,00	(6.772.019.118,00)
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	109.344.952.610,00	88.007.955.170,00	(21.336.997.440,00)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.354.309.859.090,75	869.083.155.410,20	(485.226.703.680,55)
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	890.144.364.412,00	561.839.926.423,98	(328.304.437.988,02)
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang	464.165.494.678,75	307.243.228.986,22	(156.922.265.692,53)

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	117.026.673.518,00	61.756.691.009,00	(55.269.982.509,00)
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	117.026.673.518,00	61.756.691.009,00	(55.269.982.509,00)
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	118.895.719.687,34	85.860.793.451,00	(33.034.926.236,34)
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.307.829.178,00	16.818.968.276,00	(10.488.860.902,00)
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	52.002.105.533,00	44.700.758.595,00	(7.301.346.938,00)
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.585.784.976,34	24.341.066.580,00	(15.244.718.396,34)
1.06	Sosial	115.217.106.540,00	85.704.607.701,00	(29.512.498.839,00)
1.06.01	Dinas Sosial	115.217.106.540,00	85.704.607.701,00	(29.512.498.839,00)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.127.864.545.568,27	788.287.587.022,85	(339.576.958.545,42)
2.01	Tenaga Kerja	64.649.517.186,00	44.100.158.875,00	(20.549.358.311,00)
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	64.649.517.186,00	44.100.158.875,00	(20.549.358.311,00)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.057.234.517,00	11.531.324.375,00	(6.525.910.142,00)
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.057.234.517,00	11.531.324.375,00	(6.525.910.142,00)
2.03	Pangan	175.043.676.058,00	107.690.564.831,00	(67.353.111.227,00)
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	175.043.676.058,00	107.690.564.831,00	(67.353.111.227,00)
2.05	Lingkungan Hidup	82.109.223.854,96	43.929.527.891,00	(38.179.695.963,96)
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	82.109.223.854,96	43.929.527.891,00	(38.179.695.963,96)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.131.543.271,00	12.788.077.752,00	(7.343.465.519,00)
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.131.543.271,00	12.788.077.752,00	(7.343.465.519,00)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.404.588.325,00	17.969.001.605,00	(9.435.586.720,00)
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27.404.588.325,00	17.969.001.605,00	(9.435.586.720,00)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.244.945.005,00	14.274.146.131,50	(10.970.798.873,50)
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	25.244.945.005,00	14.274.146.131,50	(10.970.798.873,50)

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
2.09	Perhubungan	111.264.237.665,65	70.776.833.969,60	(40.487.403.696,05)
2.09.01	Dinas Perhubungan	111.264.237.665,65	70.776.833.969,60	(40.487.403.696,05)
2.10	Komunikasi dan Informatika	43.387.598.091,00	28.207.667.902,04	(15.179.930.188,96)
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	43.387.598.091,00	28.207.667.902,04	(15.179.930.188,96)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53.418.112.736,00	28.686.108.739,00	(24.732.003.997,00)
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	53.418.112.736,00	28.686.108.739,00	(24.732.003.997,00)
2.12	Penanaman Modal	26.266.539.756,00	18.298.151.797,00	(7.968.387.959,00)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	26.266.539.756,00	18.298.151.797,00	(7.968.387.959,00)
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	343.256.143.807,75	308.241.752.183,80	(35.014.391.623,95)
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	343.256.143.807,75	308.241.752.183,80	(35.014.391.623,95)
2.16	Kebudayaan	102.308.726.303,91	59.291.705.970,91	(43.017.020.333,00)
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	102.308.726.303,91	59.291.705.970,91	(43.017.020.333,00)
2.17	Perpustakaan	35.322.458.991,00	22.502.565.000,00	(12.819.893.991,00)
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	35.322.458.991,00	22.502.565.000,00	(12.819.893.991,00)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	666.019.457.417,30	452.323.346.800,54	(213.696.110.616,76)
3.01	Kelautan dan Perikanan	75.941.734.397,60	38.510.054.665,50	(37.431.679.732,10)
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.941.734.397,60	38.510.054.665,50	(37.431.679.732,10)
3.03	Pertanian	309.616.357.750,06	213.600.515.984,68	(96.015.841.765,38)
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	247.893.180.663,38	176.962.599.478,00	(70.930.581.185,38)
3.03.02	Dinas Perkebunan	61.723.177.086,68	36.637.916.506,68	(25.085.260.580,00)
3.04	Kehutanan	150.436.298.471,00	120.069.821.711,72	(30.366.476.759,28)
3.04.01	Dinas Kehutanan	150.436.298.471,00	120.069.821.711,72	(30.366.476.759,28)
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	67.816.730.421,00	38.765.097.152,00	(29.051.633.269,00)
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	67.816.730.421,00	38.765.097.152,00	(29.051.633.269,00)
3.06	Perdagangan	62.208.336.377,64	41.377.857.286,64	(20.830.479.091,00)
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62.208.336.377,64	41.377.857.286,64	(20.830.479.091,00)

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.337.457.257.856,34	6.857.835.013.277,56	520.377.755.421,22
4.01	Administrasi Pemerintahan	679.343.235.678,16	588.231.200.862,16	(91.112.034.816,00)
4.01.02	KDH & WKDH	9.433.746.000,00	8.515.340.000,00	(918.406.000,00)
4.01.03	Sekretariat Daerah	266.889.383.270,68	248.385.202.036,68	(18.504.181.234,00)
4.01.03.01	<i>Biro Umum dan Perlengkapan</i>	<i>198.542.227.898,00</i>	<i>210.325.976.838,00</i>	<i>11.783.748.940,00</i>
4.01.03.02	<i>Biro Pemerintahan Umum</i>	<i>8.634.448.992,00</i>	<i>3.587.317.192,00</i>	<i>(5.047.131.800,00)</i>
4.01.03.03	<i>Biro Bina Perekonomian</i>	<i>5.738.470.815,00</i>	<i>2.382.096.902,00</i>	<i>(3.356.373.913,00)</i>
4.01.03.04	<i>Biro Sosial dan Kesejahteraan</i>	<i>11.535.463.082,00</i>	<i>5.776.484.272,00</i>	<i>(5.758.978.810,00)</i>
4.01.03.05	<i>Biro Organisasi</i>	<i>5.280.041.602,00</i>	<i>2.513.727.535,00</i>	<i>(2.766.314.067,00)</i>
4.01.03.06	<i>Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	<i>6.048.777.183,00</i>	<i>2.818.985.352,00</i>	<i>(3.229.791.831,00)</i>
4.01.03.07	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	<i>6.652.617.269,68</i>	<i>3.472.527.954,68</i>	<i>(3.180.089.315,00)</i>
4.01.03.08	<i>Biro Hukum</i>	<i>4.800.437.625,00</i>	<i>2.921.335.375,00</i>	<i>(1.879.102.250,00)</i>
4.01.03.09	<i>Biro Humas Pimpinan</i>	<i>19.656.898.804,00</i>	<i>14.586.750.616,00</i>	<i>(5.070.148.188,00)</i>
4.01.04	Sekretariat DPRD	381.397.176.082,48	314.278.546.192,48	(67.118.629.890,00)
4.01.05	Badan Penghubung Daerah	21.622.930.325,00	17.052.112.633,00	(4.570.817.692,00)
4.02	Pengawasan	63.459.326.000,00	51.369.112.372,00	(12.090.213.628,00)
4.02.01	Inspektorat Daerah Provinsi	63.459.326.000,00	51.369.112.372,00	(12.090.213.628,00)
4.03	Perencanaan	36.611.076.591,00	27.344.966.941,00	(9.266.109.650,00)
4.03.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	36.611.076.591,00	27.344.966.941,00	(9.266.109.650,00)
4.04	Keuangan	5.459.212.684.746,18	6.126.584.411.616,40	667.371.726.870,22
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.047.521.413.913,00	5.768.898.476.253,00	721.377.062.340,00
4.04.01.01	<i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)</i>	<i>77.547.845.800,00</i>	<i>40.439.847.957,00</i>	<i>(37.107.997.843,00)</i>
4.04.01.02	<i>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)</i>	<i>4.969.973.568.113,00</i>	<i>5.728.458.628.296,00</i>	<i>758.485.060.183,00</i>
4.04.02	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	411.691.270.833,18	357.685.935.363,40	(54.005.335.469,78)
4.05	Kepegawaian	35.003.379.044,00	22.642.747.676,00	(12.360.631.368,00)
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	35.003.379.044,00	22.642.747.676,00	(12.360.631.368,00)
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	39.671.181.825,00	26.210.266.926,00	(13.460.914.899,00)
4.06.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	39.671.181.825,00	26.210.266.926,00	(13.460.914.899,00)
4.07	Penelitian dan Pengembangan	24.156.373.972,00	15.452.306.884,00	(8.704.067.088,00)
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.156.373.972,00	15.452.306.884,00	(8.704.067.088,00)
	TOTAL	14.080.970.638.142,00	13.202.762.977.409,30	(878.207.660.732,75)

Selanjutnya uraian perubahan atas Belanja Tidak Langsung per Organisasi Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.452.491.002.970,00	2.335.259.441.820,00	(117.231.561.150,00)
1.01	Pendidikan	1.936.536.554.000,00	1.889.449.139.820,00	(47.087.414.180,00)
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.936.536.554.000,00	1.889.449.139.820,00	(47.087.414.180,00)
1.02	Kesehatan	192.776.065.000,00	164.390.017.000,00	(28.386.048.000,00)
1.02.01	Dinas Kesehatan	149.822.911.000,00	122.701.912.000,00	(27.120.999.000,00)
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	42.953.154.000,00	41.688.105.000,00	(1.265.049.000,00)
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	-	-	-
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	202.437.128.000,00	178.708.255.000,00	(23.728.873.000,00)
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	81.778.856.000,00	73.727.751.000,00	(8.051.105.000,00)
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang	120.658.272.000,00	104.980.504.000,00	(15.677.768.000,00)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.001.089.970,00	14.938.143.000,00	(3.062.946.970,00)
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.001.089.970,00	14.938.143.000,00	(3.062.946.970,00)
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	35.459.262.000,00	31.156.358.000,00	(4.302.904.000,00)
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.967.675.000,00	10.466.795.000,00	(1.500.880.000,00)
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	11.573.393.000,00	10.524.016.000,00	(1.049.377.000,00)
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.918.194.000,00	10.165.547.000,00	(1.752.647.000,00)
1.06	Sosial	67.280.904.000,00	56.617.529.000,00	(10.663.375.000,00)
1.06.01	Dinas Sosial	67.280.904.000,00	56.617.529.000,00	(10.663.375.000,00)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	287.166.054.000,00	247.514.526.200,00	(39.651.527.800,00)
2.01	Tenaga Kerja	41.173.585.000,00	34.195.100.200,00	(6.978.484.800,00)
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	41.173.585.000,00	34.195.100.200,00	(6.978.484.800,00)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.554.224.000,00	8.140.162.000,00	(1.414.062.000,00)
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.554.224.000,00	8.140.162.000,00	(1.414.062.000,00)
2.03	Pangan	35.025.463.000,00	30.949.793.000,00	(4.075.670.000,00)
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	35.025.463.000,00	30.949.793.000,00	(4.075.670.000,00)
2.05	Lingkungan Hidup	23.641.841.000,00	21.495.600.000,00	(2.146.241.000,00)
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	23.641.841.000,00	21.495.600.000,00	(2.146.241.000,00)

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.937.510.000,00	8.503.703.000,00	(1.433.807.000,00)
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.937.510.000,00	8.503.703.000,00	(1.433.807.000,00)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.056.965.000,00	10.831.488.000,00	(1.225.477.000,00)
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.056.965.000,00	10.831.488.000,00	(1.225.477.000,00)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.243.948.000,00	6.623.557.000,00	(620.391.000,00)
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	7.243.948.000,00	6.623.557.000,00	(620.391.000,00)
2.09	Perhubungan	37.730.914.000,00	29.442.468.000,00	(8.288.446.000,00)
2.09.01	Dinas Perhubungan	37.730.914.000,00	29.442.468.000,00	(8.288.446.000,00)
2.10	Komunikasi dan Informatika	18.315.923.000,00	15.649.038.000,00	(2.666.885.000,00)
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.315.923.000,00	15.649.038.000,00	(2.666.885.000,00)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.766.058.000,00	13.924.408.000,00	(2.841.650.000,00)
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16.766.058.000,00	13.924.408.000,00	(2.841.650.000,00)
2.12	Penanaman Modal	15.751.356.000,00	13.784.060.000,00	(1.967.296.000,00)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	15.751.356.000,00	13.784.060.000,00	(1.967.296.000,00)
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	17.409.554.000,00	16.035.340.000,00	(1.374.214.000,00)
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.409.554.000,00	16.035.340.000,00	(1.374.214.000,00)
2.16	Kebudayaan	25.206.665.000,00	22.357.244.000,00	(2.849.421.000,00)
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.206.665.000,00	22.357.244.000,00	(2.849.421.000,00)
2.17	Perpustakaan	17.352.048.000,00	15.582.565.000,00	(1.769.483.000,00)
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	17.352.048.000,00	15.582.565.000,00	(1.769.483.000,00)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	300.324.571.000,00	261.843.130.000,00	(38.481.441.000,00)
3.01	Kelautan dan Perikanan	24.142.206.000,00	21.102.773.000,00	(3.039.433.000,00)
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.142.206.000,00	21.102.773.000,00	(3.039.433.000,00)
3.03	Pertanian	113.127.348.000,00	102.480.514.000,00	(10.646.834.000,00)
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	89.675.607.000,00	82.246.995.000,00	(7.428.612.000,00)
3.03.02	Dinas Perkebunan	23.451.741.000,00	20.233.519.000,00	(3.218.222.000,00)
3.04	Kehutanan	110.838.174.000,00	93.949.685.000,00	(16.888.489.000,00)
3.04.01	Dinas Kehutanan	110.838.174.000,00	93.949.685.000,00	(16.888.489.000,00)
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	19.682.945.000,00	17.403.292.000,00	(2.279.653.000,00)
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.682.945.000,00	17.403.292.000,00	(2.279.653.000,00)
3.06	Perdagangan	32.533.898.000,00	26.906.866.000,00	(5.627.032.000,00)
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.533.898.000,00	26.906.866.000,00	(5.627.032.000,00)

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.575.033.241.613,62	6.298.971.227.615,40	723.937.986.001,78
4.01	Administrasi Pemerintahan	231.878.645.600,00	194.569.129.600,00	(37.309.516.000,00)
4.01.02	KDH & WKDH	9.433.746.000,00	8.515.340.000,00	(918.406.000,00)
4.01.03	Sekretariat Daerah	82.380.208.000,00	70.762.046.000,00	(11.618.162.000,00)
4.01.03.01	<i>Biro Umum dan Perlengkapan</i>	82.380.208.000,00	70.762.046.000,00	(11.618.162.000,00)
4.01.03.02	<i>Biro Pemerintahan Umum</i>	-	-	-
4.01.03.03	<i>Biro Bina Perekonomian</i>	-	-	-
4.01.03.04	<i>Biro Sosial dan Kesejahteraan</i>	-	-	-
4.01.03.05	<i>Biro Organisasi</i>	-	-	-
4.01.03.06	<i>Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	-	-	-
4.01.03.07	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	-	-	-
4.01.03.08	<i>Biro Hukum</i>	-	-	-
4.01.03.09	<i>Biro Humas Pimpinan</i>	-	-	-
4.01.04	Sekretariat DPRD	131.397.564.600,00	107.307.104.600,00	(24.090.460.000,00)
4.01.05	Badan Penghubung Daerah	8.667.127.000,00	7.984.639.000,00	(682.488.000,00)
4.02	Pengawasan	26.159.326.000,00	33.010.572.000,00	6.851.246.000,00
4.02.01	Inspektorat Daerah Provinsi	26.159.326.000,00	33.010.572.000,00	6.851.246.000,00
4.03	Perencanaan	17.340.016.000,00	15.729.001.000,00	(1.611.015.000,00)
4.03.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	17.340.016.000,00	15.729.001.000,00	(1.611.015.000,00)
4.04	Keuangan	5.252.016.951.013,62	6.012.613.659.015,40	760.596.708.001,78
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.989.864.270.113,00	5.744.938.187.296,00	755.073.917.183,00
4.04.01.01	<i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)</i>	19.890.702.000,00	16.479.559.000,00	(3.411.143.000,00)
4.04.01.02	<i>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)</i>	4.969.973.568.113,00	5.728.458.628.296,00	758.485.060.183,00
4.04.02	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	262.152.680.900,62	267.675.471.719,40	5.522.790.818,78
4.05	Kepegawaian	17.643.374.000,00	15.445.892.000,00	(2.197.482.000,00)
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	17.643.374.000,00	15.445.892.000,00	(2.197.482.000,00)
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	18.470.501.000,00	17.400.006.000,00	(1.070.495.000,00)
4.06.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	18.470.501.000,00	17.400.006.000,00	(1.070.495.000,00)
4.07	Penelitian dan Pengembangan	11.524.428.000,00	10.202.968.000,00	(1.321.460.000,00)
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.524.428.000,00	10.202.968.000,00	(1.321.460.000,00)
TOTAL		8.615.014.869.583,62	9.143.588.325.635,40	528.573.456.051,78

Sedangkan terhadap uraian perubahan atas belanja langsung per Organisasi Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Plafon Anggaran Belanja Langsung Organisasi Perangkat Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.497.138.374.330,09	2.769.057.588.488,30	(728.080.785.841,79)
1.01	Pendidikan	1.704.543.211.895,00	1.605.625.792.278,10	(98.917.419.616,90)
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.704.543.211.895,00	1.605.625.792.278,10	(98.917.419.616,90)
1.02	Kesehatan	410.324.187.569,00	342.446.833.639,00	(67.877.353.930,00)
1.02.01	Dinas Kesehatan	275.682.692.216,00	234.649.305.844,00	(41.033.386.372,00)
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	25.296.542.743,00	19.789.572.625,00	(5.506.970.118,00)
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	109.344.952.610,00	88.007.955.170,00	(21.336.997.440,00)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.151.872.731.090,75	690.374.900.410,20	(461.497.830.680,55)
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	808.365.508.412,00	488.112.175.423,98	(320.253.332.988,02)
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang	343.507.222.678,75	202.262.724.986,22	(141.244.497.692,53)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.025.583.548,00	46.818.548.009,00	(52.207.035.539,00)
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	99.025.583.548,00	46.818.548.009,00	(52.207.035.539,00)
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	83.436.457.687,34	54.704.435.451,00	(28.732.022.236,34)
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.340.154.178,00	6.352.173.276,00	(8.987.980.902,00)
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	40.428.712.533,00	34.176.742.595,00	(6.251.969.938,00)
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.667.590.976,34	14.175.519.580,00	(13.492.071.396,34)
1.06	Sosial	47.936.202.540,00	29.087.078.701,00	(18.849.123.839,00)
1.06.01	Dinas Sosial	47.936.202.540,00	29.087.078.701,00	(18.849.123.839,00)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	840.698.491.568,27	540.773.060.822,85	(299.925.430.745,42)
2.01	Tenaga Kerja	23.475.932.186,00	9.905.058.675,00	(13.570.873.511,00)
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	23.475.932.186,00	9.905.058.675,00	(13.570.873.511,00)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.503.010.517,00	3.391.162.375,00	(5.111.848.142,00)
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.503.010.517,00	3.391.162.375,00	(5.111.848.142,00)

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
2.03	Pangan	140.018.213.058,00	76.740.771.831,00	(63.277.441.227,00)
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	140.018.213.058,00	76.740.771.831,00	(63.277.441.227,00)
2.05	Lingkungan Hidup	58.467.382.854,96	22.433.927.891,00	(36.033.454.963,96)
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	58.467.382.854,96	22.433.927.891,00	(36.033.454.963,96)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.194.033.271,00	4.284.374.752,00	(5.909.658.519,00)
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.194.033.271,00	4.284.374.752,00	(5.909.658.519,00)
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.347.623.325,00	7.137.513.605,00	(8.210.109.720,00)
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.347.623.325,00	7.137.513.605,00	(8.210.109.720,00)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.000.997.005,00	7.650.589.131,50	(10.350.407.873,50)
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	18.000.997.005,00	7.650.589.131,50	(10.350.407.873,50)
2.09	Perhubungan	73.533.323.665,65	41.334.365.969,60	(32.198.957.696,05)
2.09.01	Dinas Perhubungan	73.533.323.665,65	41.334.365.969,60	(32.198.957.696,05)
2.10	Komunikasi dan Informatika	25.071.675.091,00	12.558.629.902,04	(12.513.045.188,96)
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.071.675.091,00	12.558.629.902,04	(12.513.045.188,96)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	36.652.054.736,00	14.761.700.739,00	(21.890.353.997,00)
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	36.652.054.736,00	14.761.700.739,00	(21.890.353.997,00)
2.12	Penanaman Modal	10.515.183.756,00	4.514.091.797,00	(6.001.091.959,00)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10.515.183.756,00	4.514.091.797,00	(6.001.091.959,00)
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	325.846.589.807,75	292.206.412.183,80	(33.640.177.623,95)
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	325.846.589.807,75	292.206.412.183,80	(33.640.177.623,95)
2.16	Kebudayaan	77.102.061.303,91	36.934.461.970,91	(40.167.599.333,00)
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	77.102.061.303,91	36.934.461.970,91	(40.167.599.333,00)
2.17	Perpustakaan	17.970.410.991,00	6.920.000.000,00	(11.050.410.991,00)
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	17.970.410.991,00	6.920.000.000,00	(11.050.410.991,00)

KODE	URUSAN/SKPD	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	365.694.886.417,30	190.480.216.800,54	(175.214.669.616,76)
3.01	Kelautan dan Perikanan	51.799.528.397,60	17.407.281.665,50	(34.392.246.732,10)
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.799.528.397,60	17.407.281.665,50	(34.392.246.732,10)
3.03	Pertanian	196.489.009.750,06	111.120.001.984,68	(85.369.007.765,38)
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	158.217.573.663,38	94.715.604.478,00	(63.501.969.185,38)
3.03.02	Dinas Perkebunan	38.271.436.086,68	16.404.397.506,68	(21.867.038.580,00)
3.04	Kehutanan	39.598.124.471,00	26.120.136.711,72	(13.477.987.759,28)
3.04.01	Dinas Kehutanan	39.598.124.471,00	26.120.136.711,72	(13.477.987.759,28)
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	48.133.785.421,00	21.361.805.152,00	(26.771.980.269,00)
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	48.133.785.421,00	21.361.805.152,00	(26.771.980.269,00)
3.06	Perdagangan	29.674.438.377,64	14.470.991.286,64	(15.203.447.091,00)
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.674.438.377,64	14.470.991.286,64	(15.203.447.091,00)
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	762.424.016.242,72	558.863.785.662,16	(203.560.230.580,56)
4.01	Administrasi Pemerintahan	447.464.590.078,16	393.662.071.262,16	(53.802.518.816,00)
4.01.02	KDH & WKDH	-	-	-
4.01.03	Sekretariat Daerah	184.509.175.270,68	177.623.156.036,68	(6.886.019.234,00)
4.01.03.01	<i>Biro Umum dan Perlengkapan</i>	116.162.019.898,00	139.563.930.838,00	23.401.910.940,00
4.01.03.02	<i>Biro Pemerintahan Umum</i>	8.634.448.992,00	3.587.317.192,00	(5.047.131.800,00)
4.01.03.03	<i>Biro Bina Perekonomian</i>	5.738.470.815,00	2.382.096.902,00	(3.356.373.913,00)
4.01.03.04	<i>Biro Sosial dan Kesejahteraan</i>	11.535.463.082,00	5.776.484.272,00	(5.758.978.810,00)
4.01.03.05	<i>Biro Organisasi</i>	5.280.041.602,00	2.513.727.535,00	(2.766.314.067,00)
4.01.03.06	<i>Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	6.048.777.183,00	2.818.985.352,00	(3.229.791.831,00)
4.01.03.07	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	6.652.617.269,68	3.472.527.954,68	(3.180.089.315,00)
4.01.03.08	<i>Biro Hukum</i>	4.800.437.625,00	2.921.335.375,00	(1.879.102.250,00)
4.01.03.09	<i>Biro Humas Pimpinan</i>	19.656.898.804,00	14.586.750.616,00	(5.070.148.188,00)
4.01.04	Sekretariat DPRD	249.999.611.482,48	206.971.441.592,48	(43.028.169.890,00)
4.01.05	Badan Penghubung Daerah	12.955.803.325,00	9.067.473.633,00	(3.888.329.692,00)
4.02	Pengawasan	37.300.000.000,00	18.358.540.372,00	(18.941.459.628,00)
4.02.01	Inspektorat Daerah Provinsi	37.300.000.000,00	18.358.540.372,00	(18.941.459.628,00)
4.03	Perencanaan	19.271.060.591,00	11.615.965.941,00	(7.655.094.650,00)
4.03.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	19.271.060.591,00	11.615.965.941,00	(7.655.094.650,00)
4.04	Keuangan	207.195.733.732,56	113.970.752.601,00	(93.224.981.131,56)
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	57.657.143.800,00	23.960.288.957,00	(33.696.854.843,00)
4.04.01.01	<i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)</i>	57.657.143.800,00	23.960.288.957,00	(33.696.854.843,00)
4.04.01.02	<i>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)</i>	-	-	-
4.04.02	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	149.538.589.932,56	90.010.463.644,00	(59.528.126.288,56)
4.05	Kepegawaian	17.360.005.044,00	7.196.855.676,00	(10.163.149.368,00)
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	17.360.005.044,00	7.196.855.676,00	(10.163.149.368,00)
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	21.200.680.825,00	8.810.260.926,00	(12.390.419.899,00)
4.06.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	21.200.680.825,00	8.810.260.926,00	(12.390.419.899,00)
4.07	Penelitian dan Pengembangan	12.631.945.972,00	5.249.338.884,00	(7.382.607.088,00)
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	12.631.945.972,00	5.249.338.884,00	(7.382.607.088,00)
TOTAL		5.465.955.768.558,38	4.059.174.651.773,85	(1.406.781.116.784,53)

Sedangkan rincian Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung yang mengalami perubahan adalah sebagaimana tabel 3-4 berikut ini.

Tabel 3-4
Plafon Anggaran Sementara untuk belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/Berkurang
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.615.014.869.583,62	9.143.588.325.635,40	528.573.456.051,78
2.1.1	Belanja Pegawai	3.645.041.301.470,62	3.415.129.697.339,40	(229.911.604.131,22)
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	2.789.387.381.922,00	2.761.841.171.922,00	(27.546.210.000,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	2.150.586.186.191,00	1.470.425.004.088,00	(680.161.182.103,00)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00	1.496.192.452.286,00	1.466.192.452.286,00


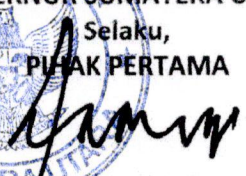
Adapun Plafon Anggaran Sementara dari Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.5 PPAS dibawah ini.


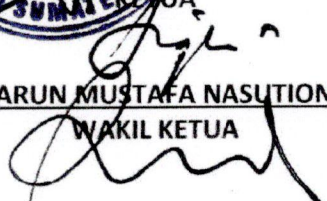
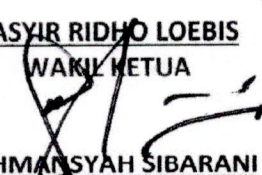

BAB IV
PENUTUP

Adapun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan kerja Perangkat Daerah secara indikatif sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 ini disampaikan untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam rangka penentuan alokasi anggaran indikatif dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 yang terlebih dahulu disepakati bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020.

Medan, 7 September 2020


GUBERNUR SUMATERA UTARA
Selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY RAHMAYADI

PIMPINAN
DEWATAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Selaku,
PIHAK KEDUA

RAHMANSYAH SIBARANI
HARUN MUSTAFA NASUTION
WAKIL KETUA

YASYIR RIDHO LOEBIS
WAKIL KETUA

RAHMANSYAH SIBARANI
WAKIL KETUA

SALMAN ALFARISI
WAKIL KETUA